



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	58.155.663.023,76	
b. Dana perimbangan	801.878.791.185,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah c. yang sah.....	273.743.926.002,00	
Jumlah Pendapatan		<u>1.133.778.380.210,76</u>

2 Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	385.601.219.408,00	
2) Belanja bunga	-	
3) Belanja subsidi	-	
4) Belanja hibah	16.914.115.000,00	
5) Belanja bantuan sosial	250.000.000,00	
6) Belanja bagi hasil	1.275.966.600,00	
7) Belanja bantuan keuangan	184.149.749.583,00	
8) Belanja tidak terduga	1.070.845.837,76	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		<u>589.261.896.428,76</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	52.514.362.039,00	
2) Belanja barang dan jasa	298.724.061.105,00	
3) Belanja Modal	229.228.060.638,00	
Jumlah Belanja Langsung		<u>580.466.483.782,00</u>
Jumlah Belanja		<u>1.169.728.380.210,76</u>
Surplus (defisit)		<u>(35.950.000.000,00)</u>

3 Pembiayaan

a. Penerimaan	38.000.000.000,00	
b. Pengeluaran	2.050.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto.....		<u>35.950.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan.		-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Des 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Des 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 53

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPHD	
5	Bupatir	
6	B Pembangunan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 53 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2018
 TENTANG
 PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019¹

Hal 1 dari 27

Kode rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.133.778.380.210,76
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.155.663.023,76
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	10.806.079.866,00
1.1.1.01.	PAJAK HOTEL	84.388.350,00
1.1.1.01.04.	HOTEL BINTANG TIGA	4.465.000,00
1.1.1.01.08.	HOTEL MELATI DUA	72.063.350,00
1.1.1.01.12.	LOSMEN/RUMAH PENGINAPAN/PESANGGRAHA/HOTEL/RUMAH KOS	7.860.000,00
1.1.1.02.	PAJAK RESTORAN	1.377.060.000,00
1.1.1.02.01.	RESTORAN	1.330.560.000,00
1.1.1.02.02.	RUMAH MAKAN	21.360.000,00
1.1.1.02.06.	WARUNG	25.140.000,00
1.1.1.03.	PAJAK HIBURAN	2.500.000,00
1.1.1.03.20.	PERTUNJUKAN/SHOW	2.500.000,00
1.1.1.04.	PAJAK REKLAME	60.042.828,00
1.1.1.04.01.	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	58.422.828,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.1.01.02	REKLAME KAIN	1.620.000,00
1.1.05	PAJAK PENERANGAN JALAN	5.400.000.000,00
1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN	5.400.000.000,00
1.1.12	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	3.873.088.688,00
1.1.12.01	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	3.873.088.688,00
1.1.13	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	9.000.000,00
1.1.13.02	BPHTB - PEMINDAHAN HAK	9.000.000,00
1.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	2.153.585.556,00
1.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM	989.405.055,00
1.1.2.01.05	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	115.796.000,00
1.1.2.01.15	PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	224.940.575,00
1.1.2.01.21	PENGAMBILAN/PENGUMPULAN SAMPAH DARI SUMBERNYA KE LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA	30.996.000,00
1.1.2.01.22	PENGANGKUTAN SAMPAH DARI SUMBERNYA DAN/ATAU LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA KE LOKASI PEMBUANGAN/PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH	78.000.000,00
1.1.2.01.52	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PELATARAN	7.104.000,00
1.1.2.01.53	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR LOS	116.102.400,00
1.1.2.01.54	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS	72.979.200,00
1.1.2.01.57	RETRIBUSI PKB MOBIL PENLUMPANG MINIBUS	1.050.000,00
1.1.2.01.59	RETRIBUSI PKB MOBIL BUS	440.000,00
1.1.2.01.60	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG/BEBAN PICK UP	58.430.000,00
1.1.2.01.61	RETRIBUSI PKB MOBIL BARANG/BEBAN TRUCK	34.430.000,00
1.1.2.01.62	PEMANFAATAN RUANG UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI	243.185.880,00
1.1.2.01.63	RETRIBUSI BUKU PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	7.950.000,00
1.1.2.03	RETRIBUSI JASA USAHA	1.083.980.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.2.02.01.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	123.320.000,00
1.1.2.02.03.	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	56.784.000,00
1.1.2.02.05.	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	145.398.500,00
1.1.2.02.08.	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	4.998.500,00
1.1.2.02.10.	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	3.840.000,00
1.1.2.02.13.	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	82.550.000,00
1.1.2.02.14.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	206.950.000,00
1.1.2.02.16.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RUANGAN	16.500.000,00
1.1.2.02.19.	FASILITAS PASAR/PERTOKOAN YANG DIKONTRAKKAN	437.340.000,00
1.1.2.02.27.	RETRIBUSI TERMINAL TEMPAT KEGIATAN USAHA	6.300.000,00
1.1.2.03.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	80.200.000,00
1.1.2.03.01.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	77.500.000,00
1.1.2.03.04.	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	2.700.000,00
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.409.190.502,76
1.1.3.01.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	3.409.190.502,76
1.1.3.01.02.	BAGIAN LABA PT. BANK LAMPUNG	3.409.190.502,76
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	41.786.507.000,00
1.1.4.02.	JASA GIRO	1.500.000.000,00
1.1.4.02.01.	JASA GIRO KAS DAERAH	1.500.000.000,00
1.1.4.03.	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	2.000.000.000,00
1.1.4.03.01.	REKENING DEPOSITO PADA BANK	2.000.000.000,00
1.1.4.10.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	1.040.575.000,00
1.1.4.10.04.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS	400.000,00
1.1.4.10.10.	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN LAIN LAIN	40.575.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.1.30.11	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN PEKERJAAN	999.600.000,00
1.1.1.32	DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	12.414.202.000,00
1.1.4.22.01	DANA KAPITASI JKN FKTP SUMBER JAYA	936.348.000,00
1.1.4.22.02	DANA KAPITASI JKN FKTP KEBUN TEBU	886.222.000,00
1.1.4.22.03	DANA KAPITASI JKN FKTP BUNGIN	666.021.000,00
1.1.4.22.04	DANA KAPITASI JKN FKTP FAJAR BULAN	899.218.000,00
1.1.4.22.05	DANA KAPITASI JKN FKTP SEKINCAU	661.634.000,00
1.1.4.22.06	DANA KAPITASI JKN FKTP PAGAR DEWA	499.644.000,00
1.1.4.22.07	DANA KAPITASI JKN FKTP BANDAR NEGERI SUOH	1.205.660.000,00
1.1.4.22.08	DANA KAPITASI JKN FKTP SRIMULYO	576.532.000,00
1.1.4.22.09	DANA KAPITASI JKN FKTP KENALI	915.900.000,00
1.1.4.22.10	DANA KAPITASI JKN FKTP BATU BRAK	620.920.000,00
1.1.4.22.11	DANA KAPITASI JKN FKTP LIWA	1.467.673.000,00
1.1.4.22.12	DANA KAPITASI JKN FKTP BUAY NYERUPA	1.365.562.000,00
1.1.4.22.13	DANA KAPITASI JKN FKTP LOMBOK	444.848.000,00
1.1.4.22.14	DANA KAPITASI JKN FKTP AIR HITAM	609.979.000,00
1.1.1.22.15	DANA KAPITASI JKN FKTP BATU KETULIS	636.043.000,00
1.1.4.23	DANA NON KAPITASI JKN PADA FKTP	2.574.000.000,00
1.1.1.23.01	DANA NON KAPITASI JKN FKTP SUMBER JAYA	205.000.000,00
1.1.1.23.02	DANA NON KAPITASI JKN FKTP KEBON TEBU	205.000.000,00
1.1.1.23.03	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BUNGIN	142.375.000,00
1.1.1.23.04	DANA NON KAPITASI JKN FKTP FAJAR BULAN	142.375.000,00
1.1.1.23.05	DANA NON KAPITASI JKN FKTP SEKINCAU	205.000.000,00
1.1.1.23.06	DANA NON KAPITASI JKN FKTP PAGAR DEWA	205.000.000,00
1.1.1.23.07	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BANDAR NEGERI SUOH	142.375.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.1.4.23.08	DANA NON KAPITASI JKN FKTP SRIMULYO	142.375.000,00
1.1.4.23.09	DANA NON KAPITASI JKN FKTP KENALI	205.000.000,00
1.1.4.23.10	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BATU BRAK	205.000.000,00
1.1.4.23.11	DANA NON KAPITASI JKN FKTP LIWA	142.375.000,00
1.1.4.23.12	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BUAY NYERUPA	142.375.000,00
1.1.4.23.13	DANA NON KAPITASI JKN FKTP LOMBOK	205.000.000,00
1.1.4.23.14	DANA NON KAPITASI JKN FKTP AIR HITAM	142.375.000,00
1.1.4.23.15	DANA NON KAPITASI JKN FKTP BATU KETULIS	142.375.000,00
1.1.4.27	PENDAPATAN BLUD	22.258.030.000,00
1.1.4.37.01	PENDAPATAN JASA LAYANAN LMLM BLUD	22.258.030.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	801.878.791.185,00
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	16.805.838.000,00
1.2.1.01	BAGI HASIL PAJAK	13.035.977.000,00
1.2.1.01.05	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21	4.477.962.000,00
1.2.1.01.06	PENGEMBALIAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT	5.341.102.000,00
1.2.1.05.11	BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU	3.216.913.000,00
1.2.1.02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	3.759.851.000,00
1.2.1.02.01	BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN	137.073.000,00
1.2.1.02.06	BAGI HASIL SDA PERIKANAN	983.593.000,00
1.2.1.02.08	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	1.390.232.000,00
1.2.1.02.13	BAGI HASIL DARI SDA PENGUSAHAAN PANAS BUMI	985.259.000,00
1.2.1.02.15	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN UMUM	273.654.000,00
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	541.427.954.000,00
1.2.2.01	DANA ALOKASI UMUM	541.427.954.000,00
1.2.2.01.01	DANA ALOKASI UMUM	541.427.954.000,00

Kode Rekening	Jumlah	Jumlah
1	2	3
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	243.644.999.185,00
1.2.3.02	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	143.472.741.185,00
1.2.3.02.01.	DAK REGULER	60.667.436.527,00
1.2.3.02.02.	DAK PENUGASAN	34.402.497.000,00
1.2.3.02.03.	DAK AFIRMASI	48.402.847.638,00
1.2.3.03	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	100.172.258.000,00
1.2.3.03.01.	DAK TUNJANGAN PROFESI GURU	62.633.223.000,00
1.2.3.03.02.	DAK TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNS / NCN PROFESI	1.017.000.000,00
1.2.3.03.03.	DAK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)	2.844.000.000,00
1.2.3.03.04.	DAK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	15.223.186.000,00
1.2.3.03.05.	DAK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	4.322.916.000,00
1.2.3.03.06.	DAK JAMINAN PERSALINAN	2.025.000.000,00
1.2.3.03.07.	DAK AKREDITASI PUSKESMAS	1.460.400.000,00
1.2.3.03.09.	DAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.225.696.000,00
1.2.3.03.10.	DAK TUNJANGAN KHUSUS GURU	6.964.259.000,00
1.2.3.03.11.	DAK PENYELENGGARAAN KESETARAAN	1.589.000.000,00
1.2.3.03.12.	DAK PELAYANAN KEPARIWISATAAN	558.580.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	273.743.926.002,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	70.048.214.000,00
1.3.1.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	35.041.614.000,00
1.3.1.01.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	35.041.614.000,00
1.3.1.06.	PENDAPATAN HIBAH DANA BOS	35.006.600.000,00
1.3.1.06.01.	HIBAH DANA BOS	35.006.600.000,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	76.606.858.002,00
1.3.3.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	76.606.858.002,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.3.3.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	14.816.052.929,00
1.3.3.01.03.	BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	17.990.736.447,00
1.3.3.01.05.	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	24.176.224.937,00
1.3.3.01.07.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	266.020.064,00
1.3.3.01.08.	BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK	19.257.221.025,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	127.188.856.000,00
1.3.4.05.	DANA ALOKASI DESA/PEKON	127.188.856.000,00
1.3.4.05.02.	DANA ALOKASI DESA/PEKON (ADP)	127.188.856.000,00
	JUNLAH PENDAPATAN	1.133.778.380.210,78

Kode Rekening	Jraian	Jumlah
1	2	3
2.	BELANJA DAERAH	1.169.728.380.210,76
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	589.261.896.428,76
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	385.601.219.408,00
2.1.1.01.	GAJI DAN TUNJANGAN	342.958.417.408,00
2.1.1.01.01.	GAJI POKOK PNS/ANGKUTAN REPRESENTASI	200.357.563.200,00
2.1.1.01.02.	TUNJANGAN KELUARGA	19.046.369.000,00
2.1.1.01.03.	TUNJANGAN LABATAN	9.041.368.000,00
2.1.1.01.04.	TUNJANGAN FUNGSIONAL	12.885.085.100,00
2.1.1.01.05.	TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	4.679.554.900,00
2.1.1.01.06.	TUNJANGAN BERAS	11.277.098.500,00
2.1.1.01.07.	TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS	622.540.000,00
2.1.1.01.08.	PEMBULATAN GAJI	3.743.000,00
2.1.1.01.09.	IURAN ASURANSI KESEHATAN	6.859.618.608,00
2.1.1.01.10.	UANG PAKET	67.032.000,00
2.1.1.01.11.	TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH	18.818.100,00
2.1.1.01.12.	TUNJANGAN KOMISI	43.299.900,00
2.1.1.01.13.	TUNJANGAN BADAN ANGGARAN	29.790.100,00
2.1.1.01.14.	TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN	10.413.900,00
2.1.1.01.15.	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA	30.000.000,00
2.1.1.01.16.	TUNJANGAN PERUMAHAN	3.072.000.000,00
2.1.1.01.18.	UANG JASA PENGABDIAN	349.160.000,00
2.1.1.01.21.	TUNJANGAN RESES	661.500.000,00
2.1.1.01.25.	TUNJANGAN TRANSPORTASI	3.072.000.000,00
2.1.1.01.24.	TUNJANGAN PROFESI GURU	62.833.223.000,00
2.1.1.01.25.	TUNJANGAN GURU PNS/NON PROFESI	1.017.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
21.1.01.25	TUNJANGAN KHUSUS GURU	5.954.259.000,00
21.1.01.27	TUNJANGA BADAN PEMBENTUAN PERATURAN DAERAH	15.931.100,00
21.1.02	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	39.427.200.000,00
21.1.02.01	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	39.344.400.000,00
21.1.02.02	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS	55.000.000,00
21.1.02.05	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA	15.800.000,00
21.1.03	BELANJA PENFRIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	3.155.880.000,00
21.1.03.01	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	2.645.000.000,00
21.1.03.02	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KDH/WKDH	400.000.000,00
21.1.03.03	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	110.880.000,00
21.1.04	BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK	58.722.000,00
21.1.04.01	BIAYA PEMUNGUTAN PBB	58.722.000,00
21.4	BELANJA HIBAH	16.914.115.000,00
21.4.03	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI	16.914.115.000,00
21.4.03.01	HIBAH KEPADA LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH	4.670.315.000,00
21.4.03.02	HIBAH KEPADA ORGANISASI OLAH RAGA DAERAH	1.075.000.000,00
21.4.03.03	HIBAH KEPADA ORGANISASI PROFESI	700.000.000,00
21.4.03.04	HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN GENERASI MUDA	675.000.000,00
21.4.03.05	HIBAH KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN	3.030.000.000,00
21.4.03.06	HIBAH KEPADA ORGANISASI SOSIAL WANITA	330.000.000,00
21.4.03.07	HIBAH KEPADA ORGANISASI SENI DAN PARIWISATA	1.085.000.000,00
21.4.03.08	HIBAH KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI PENDIDIKAN	4.293.800.000,00
21.4.03.09	HIBAH KEPADA ORGANISASI VETERAN	30.000.000,00
21.4.03.10	HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI LAINNYA	525.000.000,00
21.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	250.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.1.5.03	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT	250.000.000,00
2.1.5.03.01	BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT	250.000.000,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.275.966.600,00
2.1.6.03	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	1.060.808.000,00
2.1.6.03.01	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN PEKON	1.060.808.000,00
2.1.6.05	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	215.358.600,00
2.1.6.05.01	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN PEKON	215.358.600,00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	184.149.749.583,00
2.1.7.01	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI	900.000.000,00
2.1.7.01.01	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI	900.000.000,00
2.1.7.03	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	182.578.474.900,00
2.1.7.03.01	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEKON	182.578.474.900,00
2.1.7.05	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	671.274.683,00
2.1.7.05.01	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL	671.274.683,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.070.845.837,76
2.1.8.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.070.845.837,76
2.1.8.01.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.070.845.837,76
2.1	BELANJA LANGSUNG	590.466.483.781,00
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.514.332.039,00
2.2.1.01	HONORARIUM PNS	12.961.230.000,00
2.2.1.01.02	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN LASA	44.775.000,00
2.2.1.01.03	HONORARIUM TIM PENERIMA BARANG DAN JASA	29.925.000,00
2.2.1.01.09	HONORARIUM PESERTA	275.780.000,00
2.2.1.01.13	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	197.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.1.01.14	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN	57.350.000,00
2.2.1.01.15	HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	53.875.000,00
2.2.1.01.16	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN	6.006.800.000,00
2.2.1.01.18	INSENTIF TENAGA KESEHATAN	6.295.725.000,00
2.2.1.02	HONORARIUM NON PNS	18.442.645.000,00
2.2.1.02.02	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	13.235.340.000,00
2.2.1.02.03	HONORARIUM PESERTA	2.584.775.000,00
2.2.1.02.04	HONORARIUM TENAGA MEDIS	61.980.000,00
2.2.1.02.05	HONORARIUM TENAGA SURVEY	559.300.000,00
2.2.1.02.06	HONORARIUM TEKNISI ICT	15.600.000,00
2.2.1.02.07	HONORARIUM/UPAH TENAGA TIDAK TERAMPIL	707.125.000,00
2.2.1.02.08	HONORARIUM/UPAH TUKANG	164.655.000,00
2.2.1.02.09	HONORARIUM/UPAH TENAGA KEBERSIHAN	674.670.000,00
2.2.1.02.10	HONORARIUM/UPAH KEPALA LINGKUNGAN	439.200.000,00
2.2.1.05	UANG LEMBUR	796.865.000,00
2.2.1.05.01	UANG LEMBUR PNS	796.865.000,00
2.2.1.09	HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS	7.048.117.539,00
2.2.1.04.01	HONORARIUM PENGELOLAAN DANA BOS.	7.048.117.539,00
2.2.1.07	BELANJA PEGAWAI BLUD	11.508.400.000,00
2.2.1.07.01	BELANJA PEGAWAI BLUD.	11.508.400.000,00
2.2.1.08	BELANJA PEGAWAI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1.757.104.500,00
2.2.1.08.01	BELANJA PEGAWAI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1.757.104.500,00
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	298.724.051.105,00
2.2.2.01	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	9.525.270.750,00
2.2.2.01.01	BELANJA ALAT TULUS KANTOR	6.473.032.950,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.01.02	BELANJA DOKUMEN/ ADMINISTRASI TENDER	1.400.000,00
2.2.01.03	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	862.232.800,00
2.2.01.04	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS	163.729.000,00
2.2.01.05	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	953.031.900,00
2.2.01.06	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	520.541.600,00
2.2.01.07	BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	19.500.000,00
2.2.01.08	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	170.780.000,00
2.2.01.09	BELANJA DOKUMENTASI	328.353.000,00
2.2.01.10	BELANJA BAHAN KEDOTERAN HEWAN	26.980.000,00
2.2.01.11	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS PERLENGKAPAN GUDANG	7.679.500,00
2.2.02	BELANJA BAHAN/MATERIAL	11.592.004.579,00
2.2.02.01	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN	1.125.331.400,00
2.2.02.02	BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN	565.580.000,00
2.2.02.03	BELANJA BIBIT TERNAK	315.925.000,00
2.2.02.04	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	4.109.004.979,00
2.2.02.05	BELANJA BAHAN KIMIA	984.160.100,00
2.2.02.07	BELANJA TEROPY/PIALA	179.985.000,00
2.2.02.08	BELANJA BAHAN PENGOBATAN	1.094.183.000,00
2.2.02.09	BELANJA BAHAN PAMERAN	583.380.000,00
2.2.02.10	BELANJA BAHAN ELEKTRONIK / MESIN	360.886.000,00
2.2.02.11	BELANJA BAHAN DISPLAY/DEKORASI	426.136.000,00
2.2.02.12	BELANJA BAHAN PERALATAN KESEHATAN	311.560.000,00
2.2.02.13	BELANJA BAHAN PERAGA	654.694.250,00
2.2.02.14	BELANJA BAHAN MATERIAL PERTANIAN/PERKEBUNAN	386.656.000,00
2.2.02.15	BELANJA BAHAN SARANA BUDIDAYA IKAN	33.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.02.18.	BELANJA BAHAN/ALAT SAMPLE	58.318.750,00
2.2.2.02.19.	BELANJA BAHAN MAKANAN	144.562.000,00
2.2.2.02.20.	BELANJA BAHAN/MATERIAL ALAT PENGOLAHAN	121.253.000,00
2.2.2.02.21.	BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN LOMBA	252.800.000,00
2.2.2.02.22.	BELANJA BAHAN RUMAH TANGGA	20.440.000,00
2.2.2.02.23.	BELANJA BAHAN PELATIHAN/SEMINAR KIT	69.031.000,00
2.2.2.02.24.	BELANJA BAHAN BAKU PEMBUATAN KEMASAN	34.119.100,00
2.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	26.146.212.292,00
2.2.2.03.01.	BELANJA TELEPON	974.049.992,00
2.2.2.03.02.	BELANJA AIR	257.196.000,00
2.2.2.03.03.	BELANJA LISTRIK	5.544.295.800,00
2.2.2.03.05.	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	3.059.650.000,00
2.2.2.03.06.	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET	1.650.244.000,00
2.2.2.03.07.	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN	122.996.000,00
2.2.2.03.08.	BELANJA SERTIFIKASI	324.600.000,00
2.2.2.03.09.	BELANJA JASA TRANSAKSI KEUANGAN	3.289.599.000,00
2.2.2.03.12.	BELANJA JASA PERBAIKAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00
2.2.2.03.13.	BELANJA JASA MEDIA ELEKTRONIK	1.656.600.000,00
2.2.2.03.15.	BELANJA JASA PUBLIKASI	7.986.011.500,00
2.2.2.03.17.	BELANJA JASA PERAWATAN DAN PENGOBATAN	995.000.000,00
2.2.2.03.22.	BELANJA JASA UJI LABORATORIUM	237.200.000,00
2.2.2.03.30.	BELANJA JASA RETRIBUSI SAMPAH	1.380.000,00
2.2.2.03.32.	BELANJA JASA PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN	40.640.000,00
2.2.2.03.33.	BELANJA SEWA SERVER	750.000,00
2.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	9.524.464.000,00
2.2.2.04.01.	BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN	9.875.914.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.04.02.	BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	10.800.000,00
2.2.2.04.04.	BELANJA PREMI ASURANSI JIWA	37.750.000,00
2.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	10.892.719.867,00
2.2.2.05.01.	BELANJA JASA SERVICE	657.519.000,00
2.2.2.05.02.	BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG	1.080.494.500,00
2.2.2.05.03.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	6.524.218.300,00
2.2.2.05.04.	BELANJA JASA KIR	17.709.000,00
2.2.2.05.05.	BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN	328.894.750,00
2.2.2.05.07.	BELANJA BAN DAN ACCU	1.895.786.000,00
2.2.2.05.08.	BELANJA REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR	188.098.317,00
2.2.2.05.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	16.200.089.086,00
2.2.2.06.01.	BELANJA CETAK	10.136.984.200,00
2.2.2.06.02.	BELANJA PENGGANDAAN	5.897.693.386,00
2.2.2.06.03.	BELANJA PENJILIDAN (+ COVER)	165.411.500,00
2.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	3.154.930.000,00
2.2.2.07.01.	BELANJA SEWA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	31.000.000,00
2.2.2.07.02.	BELANJA SEWA GEDUNG/ KANTOR/TEMPAT	1.164.115.000,00
2.2.2.07.03.	BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	155.100.000,00
2.2.2.07.05.	BELANJA SEWA KEBUN / PERLENGKAPAN TAMAN	11.500.000,00
2.2.2.07.06.	BELANJA SEWA HOTEL/PENGINAPAN	1.793.215.000,00
2.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	500.100.000,00
2.2.2.08.01.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	494.400.000,00
2.2.2.08.02.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS AIR	5.700.000,00
2.2.2.09.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	3.496.207.500,00
2.2.2.09.01.	BELANJA SEWA MEJA KURSI	593.252.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.10.04	BELANJA SEWA GENERATOR	77.500.000,00
2.2.2.10.05	BELANJA SEWA TENDA	1.494.950.000,00
2.2.2.10.06	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	19.400.000,00
2.2.2.10.07	BELANJA SEWA ALAT SETUDIO	875.555.000,00
2.2.2.10.09	BELANJA SEWA ELEKTRONIK	260.800.000,00
2.2.2.10.10	BELANJA SEWA ALAT DEKORASI	153.500.000,00
2.2.2.10.14	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	21.750.000,00
2.2.2.10.15	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	1.500.000,00
2.2.2.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	24.665.268.500,00
2.2.2.11.01	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	7.739.804.500,00
2.2.2.11.02	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	4.083.213.100,00
2.2.2.11.03	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	1.268.353.000,00
2.2.2.11.04	BELANJA MAKAN DAN MINUM INSIDENTIL	3.876.587.000,00
2.2.2.11.05	BELANJA MAKAN DAN MINUM RUMAH TANGGA	1.765.600.000,00
2.2.2.11.08	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN	0.041.558.500,00
2.2.2.11.09	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN SOSIALISASI	885.172.400,00
2.2.2.12	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	1.140.870.000,00
2.2.2.12.01	BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	166.800.000,00
2.2.2.12.02	BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	140.000.000,00
2.2.2.12.03	BELANJA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)	96.250.000,00
2.2.2.12.04	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	49.250.000,00
2.2.2.12.05	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	81.000.000,00
2.2.2.12.06	BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)	168.610.000,00
2.2.2.12.07	BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)	37.500.000,00
2.2.2.12.08	BELANJA ATRIBUT	350.860.000,00
2.2.2.13	BELANJA PAKAIAN KERJA	1.695.717.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.2.13.01.	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	1.219.948.000,00
2.2.2.13.02.	BELANJA PAKAIAN KERJA BESERTA KELENGKAPANYA	406.421.000,00
2.2.2.13.03.	BELANJA TAS	60.350.000,00
2.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	1.195.215.000,00
2.2.2.14.02.	BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH	180.000.000,00
2.2.2.14.03.	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	209.875.000,00
2.2.2.14.04.	BELANJA PAKAIAN OLAH RAGA	481.340.000,00
2.2.2.14.05.	BELANJA PAKAIAN PASKIBRA	315.000.000,00
2.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	55.226.710.133,00
2.2.2.15.01.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	18.518.535.144,00
2.2.2.15.02.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	30.103.417.989,00
2.2.2.15.05.	BELANJA TRANSPORTASI	8.604.757.000,00
2.2.2.16.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	157.120.000,00
2.2.2.16.01.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR D3	9.550.000,00
2.2.2.16.02.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S1	53.570.000,00
2.2.2.16.03.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2	94.200.000,00
2.2.2.17.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	3.626.305.000,00
2.2.2.17.01.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT / PELATIHAN	3.490.655.000,00
2.2.2.17.03.	BELANJA BIMBINGAN TEKNIS	135.750.000,00
2.2.2.20.	BELANJA PEMELIHARAAN	4.583.047.600,00
2.2.2.20.03.	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1.448.958.000,00
2.2.2.20.05.	BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH JABATAN	126.529.600,00
2.2.2.20.06.	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK	55.400.000,00
2.2.2.20.07.	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI TELEFON	5.000.000,00
2.2.2.20.08.	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI AIR	11.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.20.09	BELANJA PEMELIHARAAN TAMAN	38.750.000,00
2.2.20.10	BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR	155.675.000,00
2.2.20.12	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	1.376.493.000,00
2.2.20.14	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT PERTANIAN	19.800.000,00
2.2.20.16	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	5.000.000,00
2.2.20.17	BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN SEJARAH	49.400.000,00
2.2.20.19	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELAIR	49.900.000,00
2.2.20.20	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	460.067.000,00
2.2.20.21	BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN	35.000.000,00
2.2.20.22	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN RUMAH JABATAN	85.200.000,00
2.2.20.24	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN/INSTALASI INTERNET / WEBSITE	322.444.000,00
2.2.20.26	BELANJA PEMELIHARAAN FASILITAS UMUM	245.545.000,00
2.2.20.37	PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN	50.073.000,00
2.2.20.38	BELANJA PEMELIHARAAN LABEL KEPEMILIKAN TANAH	36.000.000,00
2.2.20.29	BELANJA PEMELIHARAAN DAN RELOKASI BALIHO	15.000.000,00
2.2.21	BELANJA JASA KONSULTANSI/PIHAK KETIGA	8.545.483.000,00
2.2.21.01	BELANJA JASA KONSULTASI PENELITIAN	1.385.000.000,00
2.2.21.02	BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN	5.200.983.000,00
2.2.21.03	BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN	128.300.000,00
2.2.21.04	BELANJA JASA KONSULTANSI SOFTWARE	67.700.000,00
2.2.21.05	BELANJA JASA KONSULTANSI PENDAMPINGAN	680.000.000,00
2.2.21.06	BELANJA JASA KONSULTANSI LEMBAGA PENILAI	350.000.000,00
2.2.21.07	BELANJA JASA EVENT ORGANIZER	412.000.000,00
2.2.21.08	BELANJA JASA CLEANING SERVICE	321.500.000,00
2.2.22	BELANJA BARANG DANA BOS	18.422.916.734,00
2.2.23	BELANJA BARANG DANA BOS	18.422.916.734,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.3.1.23	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA	54.701.880.000,00
2.3.1.23.01	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	52.073.442.000,00
2.3.1.23.02	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	2.628.438.000,00
2.3.1.23.03	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	1.574.868.000,00
2.3.1.23.04	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT	1.735.368.000,00
2.3.1.23.05	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	339.500.000,00
2.3.1.26	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	12.784.630.000,00
2.3.1.26.01	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	12.784.000.000,00
2.3.1.27	BELANJA BARANG DAN JASA BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1.843.781.500,00
2.3.1.27.01	BELANJA BARANG DAN JASA BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1.843.781.500,00
2.3.1.28	HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER	17.116.230.560,00
2.3.1.28.01	HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER	17.072.230.560,00
2.3.1.28.02	HONORARIUM MODERATOR	44.000.000,00
2.3	BELANJA MODAL	229.228.060.638,00
2.3.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH	800.000.000,00
2.3.01.66	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH KOSONG	800.000.000,00
2.3.02	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	184.300.000,00
2.3.02.09	BELANJA MODAL PENGADAAN SHINE SAW	15.000.000,00
2.3.02.10	BELANJA MODAL PENGADAAN DONGKRAN HIDROLIK	1.500.000,00
2.3.02.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN POMPA AIR	135.000.000,00
2.3.02.28	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGANGKAT	28.600.000,00
2.3.02.35	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN BOR	3.200.000,00
2.3.03	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5.648.382.000,00
2.3.03.05	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR MICRO BUS	1.550.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.03.06	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR TRUCK	999.000.000,00
2.2.3.03.09	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR PICK UP	654.800.000,00
2.2.3.03.10	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR AMBULANS	1.206.800.000,00
2.2.3.03.12	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SEPEDA MOTOR	536.282.000,00
2.2.3.03.26	BELANJA MODAL ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR AMBULANCE	500.000.000,00
2.2.3.04	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT TIDAK BERMOTOR	1.000.000,00
2.2.3.04.01	BELANJA MODAL PENGADAAN GEROBAK	1.000.000,00
2.2.3.05	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DI ATAS AIR TIDAK BERMOTOR	75.000.000,00
2.2.3.06.04	BELANJA MODAL PENGADAAN PERAHU KARET	75.000.000,00
2.2.3.08	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BENCIKEL	74.700.000,00
2.2.3.08.10	BELANJA MODAL PENGADAAN GERINDA	3.200.000,00
2.2.3.08.14	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG BERPINGAH	70.000.000,00
2.2.3.08.26	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS STANDAR (STANDART TOOL)	1.500.000,00
2.2.3.09	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN	74.250.000,00
2.2.3.09.11	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN POTONG RUMPUT	29.200.000,00
2.2.3.09.12	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4.000.000,00
2.2.3.09.13	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PANEN/PENGOLAHAN	10.200.000,00
2.2.3.09.15	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PROCESING	30.650.000,00
2.2.3.10	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR	1.500.590.000,00
2.2.3.10.01	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN TIK	6.680.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.10.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	57.750.000,00
2.2.3.10.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN GENSET	1.008.000.000,00
2.2.3.10.16.	BELANJA PENGADAAN PERALATAN SAR	220.000.000,00
2.2.3.10.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN AC	73.100.000,00
2.2.3.10.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PEMINDAI SIDIK JARI	234.000.000,00
2.2.3.10.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KIPAS ANGIN	1.060.000,00
2.2.3.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.123.141.000,00
2.2.3.11.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALMARI	419.205.000,00
2.2.3.11.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN FILLING KABINET	4.940.000,00
2.2.3.11.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGAMAN KANTOR	20.000.000,00
2.2.3.11.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN BENDERA/UMBUL UMBUL	2.394.000,00
2.2.3.11.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN GORDEN	377.162.000,00
2.2.3.11.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN KARPET	56.400.000,00
2.2.3.11.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAPAN STRUKTUR	20.000.000,00
2.2.3.11.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN PALLET	23.000.000,00
2.2.3.11.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANGGA	6.000.000,00
2.2.3.11.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	194.040.000,00
2.2.3.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	2.290.878.895,00
2.2.3.12.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER/PC	430.270.000,00
2.2.3.12.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAPTOP/NOTE BOOK	717.150.000,00
2.2.3.12.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	173.691.000,00
2.2.3.12.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN SCANNER	12.760.000,00
2.2.3.12.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MONITOR/DISPLAY/LCD	20.000.000,00
2.2.3.12.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN UPS/STABILIZER	104.050.000,00
2.2.3.12.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER	285.157.895,00
2.2.3.12.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE/SISTEM APLIKASI KOMPUTER	122.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.23.12.12	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN INTERNET	410.300.000,00
2.23.12.14	BELANJA MODAL PENGADAAN HARD DISK EXTERNAL	15.000.000,00
2.23.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR	7.589.761.250,00
2.23.13.01	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA	134.300.000,00
2.23.13.02	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT	32.650.000,00
2.23.13.03	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA MAKAN	202.500.000,00
2.23.13.04	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA	155.734.000,00
2.23.13.05	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT	12.000.000,00
2.23.13.07	BELANJA MODAL PENGADAAN TEMPAT TIDUR	630.000.000,00
2.23.13.08	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFA	505.000.000,00
2.23.13.13	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK	32.000.000,00
2.23.13.18	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU	18.500.000,00
2.23.13.19	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA TAMU	1.500.000,00
2.23.13.20	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH	5.261.500.000,00
2.23.13.22	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR KANTOR	408.077.250,00
2.23.13.29	BELANJA MODAL PENGADAAN LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	40.000.000,00
2.23.13.30	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR RUMAH DINAS	156.000.000,00
2.23.14	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAPUR	478.500.000,00
2.23.14.01	BELANJA MODAL PENGADAAN TABUNG GAS	200.000,00
2.23.14.02	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPOR GAS	600.000,00
2.23.14.04	BELANJA MODAL PENGADAAN DISPENSER	1.300.000,00
2.23.14.05	BELANJA MODAL PENGADAAN KULKAS	10.600.000,00
2.23.14.06	BELANJA MODAL PENGADAAN RAK PIRING	500.000,00
2.23.14.07	BELANJA MODAL PENGADAAN PIRING/GELAS/MANGKOK/CANGKIR/SENDOK/GARPU/PISAU	251.600.000,00
2.23.14.08	BELANJA MODAL PENGADAAN TEMPAT BAHAN MAKANAN	38.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.23.14.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN MEMASAK	150.000.000,00
2.23.14.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN RICE COOKER	500.000,00
2.23.14.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN ESPRESSO	15.000.000,00
2.23.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA	366.000.000,00
2.23.15.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU HIAS	25.000.000,00
2.23.15.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN JAM DINDING/MEJA	1.000.000,00
2.23.15.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN PENGHIAS RUANGAN	340.000.000,00
2.23.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO	289.126.000,00
2.23.16.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA	82.120.000,00
2.23.16.03.	BELANJA MODAL PROYEKTOR	20.100.000,00
2.23.16.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN MOKROFON	11.500.000,00
2.23.16.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEVISI	99.100.000,00
2.23.16.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM	59.500.000,00
2.23.16.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN LAYAR/SCREEN	3.000.000,00
2.23.16.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN PARABOLA SET	1.300.000,00
2.23.16.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN DRONE	12.500.000,00
2.23.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI	708.060.000,00
2.23.17.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPON	148.000.000,00
2.23.17.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN FAXIMILI	7.500.000,00
2.23.17.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO HF/FM (HANDY TALKIE)	7.000.000,00
2.23.17.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEPON SELULER	170.000.000,00
2.23.17.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN KIT PENDIDIKAN DAN KEPENDUDUKAN	331.000.000,00
2.23.17.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN RADIO KOMUNIKASI DAN PERLENGKAPANNYA	21.060.000,00
2.23.17.37.	BELANJA MODAL PENGADAAN SWITCHER/MENARA ANTENA	25.500.000,00
2.23.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	2.455.252.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.23.18.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TIMBANGAN	1.300.000,00
2.23.18.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT GPS	15.000.000,00
2.23.18.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR	1.710.652.000,00
2.23.18.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN METERAN	14.800.000,00
2.23.18.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN TERMOMETER	24.000.000,00
2.23.18.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR/PEMBANDING	669.500.000,00
2.23.18.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR KEKERASAN BETON/HAMMER TES	20.000.000,00
2.23.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN	6.162.535.290,00
2.23.19.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN UMUM	5.574.175.290,00
2.23.19.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT FARMASI	350.625.000,00
2.23.19.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT - ALAT PERLENGKAPAN KEDOKTERAN	132.735.000,00
2.23.19.18.	BELANJA MODAL SARANA PELAYANAN KB	105.000.000,00
2.23.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM	68.900.000,00
2.23.20.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PETERNAKAN	27.400.000,00
2.23.20.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM PERIKANAN	16.500.000,00
2.23.20.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN	25.000.000,00
2.23.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN	68.200.467.000,00
2.23.21.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN,	64.438.567.000,00
2.23.21.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	80.000.000,00
2.23.21.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN DESA	3.606.900.000,00
2.23.21.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN KHUSUS	75.000.000,00
2.23.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN	3.800.000.000,00
2.23.22.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN PENYEBRANGAN DIATAS AIR	3.800.000.000,00
2.23.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI SARINGAN AIR	21.848.221.999,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
213.21.01	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI WADUK	500.000.000,00
213.23.01	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	10.620.844.000,00
213.23.06	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH (AIR MINUM)	5.622.577.999,00
213.23.10	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PENGAMAN PANTAI	500.000.000,00
213.23.11	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI SUNGAI	4.900.000.000,00
213.23.12	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN DRAINASE	500.000.000,00
213.23.13	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	105.000.000,00
213.23.30	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PEMBUANG PASANG RAWA	1.100.000.000,00
223.24	BELANJA MODAL PENGADAAN PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA	1.889.000.000,00
223.24.02	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU HIAS TAMAN	4.000.000,00
223.24.04	BELANJA MODAL PENGADAAN LAMPU JALAN	485.000.000,00
223.24.05	BELANJA MODAL PENGADAAN TAMAN DAN TANAMAN PELINDUNG	1.400.000.000,00
223.25	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK DAN TELEPON	180.615.000,00
223.25.01	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK	175.615.000,00
223.25.02	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI TELEPON	5.000.000,00
223.26	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN	70.121.802.477,00
223.26.01	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG KANTOR	36.406.984.877,00
223.26.02	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI RUMAH JABATAN	296.833.400,00
223.26.03	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI RUMAH DINAS	3.338.466.000,00
223.26.04	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG GUDANG	114.000.000,00
223.26.05	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN BERSEJARAH	132.000.000,00
223.26.10	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN TAMAN	692.250.000,00
223.26.11	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN PASAR	1.793.868.200,00
223.26.23	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI TEMPAT WISATA	1.923.612.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
2.2.3.26.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI PAGAR	2.262.718.000,00
2.2.3.26.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI BANGUNAN SEKOLAH	18.988.459.000,00
2.2.3.26.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN/PEMBUJANGAN SAMPAH	300.000.000,00
2.2.3.26.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN/DERMAGA	200.000.000,00
2.2.3.26.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI BANGUNAN RUANG PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF	151.000.000,00
2.2.3.26.41.	BELANJA MODAL PENGADAAN PLANG	116.250.000,00
2.2.3.26.44.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	321.500.000,00
2.2.3.26.45.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN KESEHATAN	1.299.433.000,00
2.2.3.26.53.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	323.350.000,00
2.2.3.26.56.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI JAMBAN	1.000.968.000,00
2.2.3.26.60.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	133.000.000,00
2.2.3.26.81.	BELANJA MODAL PENGADAAN TUGU/TANDA BATAS	237.500.000,00
2.2.3.26.93.	BELANJA MODAL PENGADAAN PRASASTI	90.000.000,00
2.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	992.000.000,00
2.2.3.27.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00
2.2.3.27.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU BAHASA DAN AKSARA	247.000.000,00
2.2.3.27.36.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN	725.000.000,00
2.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KESENIAN, KEBUDAYAAN	133.100.000,00
2.2.3.28.36.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KESENIAN	133.100.000,00
2.2.3.31.	BELANJA MODAL DANA BOS	9.535.565.727,00
2.2.3.31.01.	BELANJA MODAL DANA BOS	9.535.565.727,00
2.2.3.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KONSTRUKSI/ PERTUKANGAN	51.490.000,00

Kode Rekening	Jraiat	Jumlah
1	2	3
2.23.32.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KONSTRUKSI/ PERTUKANGAN	51.490.000,00
2.23.34.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN / PERALATAN PRAKTEK	362.597.000,00
2.23.34.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN / PERALATAN PRAKTEK	362.597.000,00
2.23.35.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN	91.625.000,00
2.23.35.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN.	91.625.000,00
2.23.36.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERANGKAP	34.000.000,00
2.23.36.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT TANGKAP TERNAK	34.000.000,00
2.23.37.	BELANJA MODAL PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	166.000.000,00
2.23.37.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN HALTE	166.000.000,00
2.23.38	BELANJA MODAL BLUD	1.000.000.000,00
2.23.38.01.	BELANJA MODAL BLUD.	1.000.000.000,00
2.23.43.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ALAT BERMAIN	412.330.000,00
2.23.43.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BERMAIN TK	412.330.000,00
2.23.45.	BELANJA MODAL PERLENGKAPAN OLAH RAGA	71.370.000,00
2.23.45.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT OLAH RAGA AIR	25.620.000,00
2.23.45.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASAMANI OLAH RAGA DAN KESEHATAN (PJOK)	45.750.000,00
2.23.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN DISPLAY	333.000.000,00
2.23.49.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN BILBORD	333.000.000,00
2.23.50.	BELANJA MODAL PEMBUATAN TEMPAT PARKIR	14.000.000,00
2.23.50.01.	PEMBUATAN TEMPAT PARKIR	14.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.159.728.380.210,76
	SURPLUS/(DEFISIT)	(35.950.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	35.950.000.000,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.000.000.000,00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	38.000.000.000,00
3.1.1.04.	SISA PENGHEMATAN BELANJA ATAU AKIBAT LAINNYA	38.000.000.000,00
3.1.1.04.01.	BELANJA PEGAWAI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.250.000.000,00
3.1.1.04.02.	BELANJA PEGAWAI DARI BELANJA LANGSUNG	2.067.990.000,00
3.1.1.04.03.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.682.010.000,00
3.1.1.04.04.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.050.000.000,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	2.050.000.000,00
3.2.2.02.	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	2.050.000.000,00
3.2.2.02.02.	PT. BANK LAMPUNG	500.000.000,00
3.2.2.02.03.	PDAM " LIMAU KUNCI "	1.550.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.050.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	35.950.000.000,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS